

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, 2013, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Cetakan ke-2*, Kencana, Jakarta.
- Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Budiono, Herlien, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fadli, Zul, 2020, *Hukum Akta Notaris, Cetakan Pertama*, Lingkar Kenotariatan, Jambi.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HS, Salim, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lubis, Mhd. Yamin dan Abd. Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung,
- Mahendra, A.A, 2001, *Tugas dan Wewenang Jabatan PPAT Sementara*, Pustaka Ilmu, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1977, *Hukum Acara Perdata Indonesia, cetakan ke-1*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Hukum Acara Perdata, Edisi Ke Enam*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Prinst, Darwan, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta
- Prodjohamidjojo, Martiman 1984, *Komentaris atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Samudera, Teguh, 1992, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Cetakan I*, Alumni Bandung,
- Satrio, J, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian (Buku I), Cet. 2*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Santoso, Urip, 2016, *Pejabat Pembuat Akta Tanah, Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, Prenadamedia, Jakarta.
- Soekanto, Sarjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Cetakan II*, Mandar Maju, Bandung
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Subektidan R. Tjitrosudibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suharjono, 1995, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Desember, Jakarta.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian, Teori Dan Analisa Kasus*, Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2009, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Impelmentasi*, Kompas, Jakarta.
- Sumoharjo, Urip, 2010, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah Edisi Pertama*, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta.
- Sutendi, Adrian, 2012, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 2010, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata Edisi Revisi*, Alumni, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk wetboek voor Indonesie*)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

### C. Skripsi/Tesis/Penulisan Hukum

Indira Putri Irfani, “Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Keabsahan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Yang Dibuat Berdasar Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Yang Telah Lewat Jangka Waktu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 105/Pdt.Plw/2015/PN.Skh)”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.

Milda Ariezza Zahrovita, “Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Yang Ditandatangani Tanpa Kehadiran Kreditur”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.

### D. Jurnal/Makalah

Ardisetyaning Cintia Primipara, Iwan Permadi, & Istislam, Urgensi Keberadaan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), *Jurnal Kenotariatan*, 2019, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Avita Nendy, Falief Yolanda, Ana Silviana, & Dewi Hendrawati, Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal*, Volume 8, Nomor 3, 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.